

## Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo

Ibnu Ngakil<sup>1)</sup>, M. Elfan Kaukab<sup>2)\*</sup>

<sup>1)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

<sup>2)</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo

<sup>2)\*</sup> [elfan@unsiq.ac.id](mailto:elfan@unsiq.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei, dengan sasaran penelitian yaitu masyarakat yang tinggal pada sembilan desa di Kabupaten Wonosobo. Penentuan teknik dalam pengambilan sampel menggunakan *multi stage cluster systematic sampling* sehingga diperoleh sampel 100 responden. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada selama ini sudah dikelola secara optimal dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan. Transparansi keuangan didukung dengan kemudahan akses informasi keuangan secara *offline* dan *online*, mekanisme kontrol dari anggota masyarakat dan lembaga desa, dan juga model publikasi yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, keuangan desa telah dikelola secara akuntabel oleh pemerintah desa yang dapat dilihat dari kesesuaian antara kegiatan dengan prosedur pelaksanaan, adanya sanksi dengan mengedepankan pencegahan penyalahgunaan keuangan desa, pembuatan laporan keuangan secara berkala sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah desa. Persepsi masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo dalam kategori baik. Kondisi yang demikian merupakan bagian penting dalam proses memajukan desa dengan memanfaatkan keuangan desa secara optimal tiap tahunnya.

**Kata kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Desa

### Abstract

*This study aims to analyze the transparency and accountability of financial management of village in Wonosobo Regency. The research used survey method, with the target of the research being the people living in nine villages in Wonosobo Regency. Determination of the technique in sampling using a multi-stage cluster systematic sampling to obtain a sample of 100 respondents. While the analysis used descriptive technique. The results showed that the existing village financial management had been managed optimally by promoting transparency and accountability by the provisions. Financial transparency is supported by easy access to financial information offline and online, control mechanisms from community members and village institutions, and also a publication model that is easily understood and understood by the community. In addition, village finance has been managed accountably by the village government which can be seen from the suitability of the activities with the implementation procedures, the existence of sanctions by prioritizing the prevention of misuse of village finances, making regular financial reports to increase public confidence in the village government. Public perceptions regarding transparency and accountability in village financial management in Wonosobo Regency are in the good category. Such conditions are an important part of the process of advancing villages by utilizing village finances optimally each year.*

**Keywords:** Transparency, Accountability, Village Finance

## 1. LATAR BELAKANG

Salah satu upaya pemerintah melakukan percepatan pembangunan didesa diantaranya dengan memberikan stimuli dalam bentuk dana pembangunan, yang saat ini dikenal sebagai Dana Desa (DD). Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Filosofi dana desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai komitmen pemerintah untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sehingga pembangunan dapat merata sampai tingkat desa.

Saat ini, penerimaan dana pembangunan desa berasal dari berbagai macam sumber, dana yang bersumber dari APBN dinamakan dana desa (DD), sementara itu ada juga kewajiban 10% dari dana alokasi umum (DAU) ditambah dana bagi hasil (DBH) dinamakan alokasi dana desa (ADD). Selain itu, desa juga punya kapasitas untuk menghasilkan uang dan masuk sebagai Penerimaan Asli Desa. Karena ide dana desa ini adalah pemerataan dan keadilan, maka perhitungannya juga merefleksikan kedua hal itu. Alokasi formula ini memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis per desa. Selain itu, ada juga yang namanya alokasi afirmasi. Ini adalah tambahan uang ke desa yang dianggap tertinggal dan sangat tertinggal. Tahun 2019, Dana Desa disalurkan ke Pemda 3 kali, bulan Januari sebesar 20%, Maret 40%, dan Juli sebesar 40%, setelah masuk di Pemda, maka akan diteruskan ke desa maksimal 7 hari kerja. Melihat kondisi yang demikian, maka komposisi penerimaan desa baik yang bersumber dari DD maupun ADD berbeda satu sama lain, karena itulah dikenal dengan desa dengan APBDes besar dan desa dengan APBDes kecil. Semua alokasi tersebut tetap disesuaikan dengan karakteristik desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (APBDes) perlu menerapkan prinsip *good governance* sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik. *Governance* adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan juga bisa diartikan sebagai pemerintahan. Apabila dalam proses pemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini *good governance* adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012).

Hasil penelitian Astuti dan Yulianto (2016) menjelaskan adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No. 14 tentang desa. Hambatan dalam pelaksanaan *good governance* pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap (Kaukab, 2020). Padahal di sisi lain, anggaran yang diterima desa sejak diberlakukannya UU Desa nilainya cukup signifikan, bahkan untuk beberapa desa nilainya berlipat-lipat dari sebelumnya, termasuk desa-desa di Kabupaten Wonosobo. Beberapa desa dengan nilai APBDes terbesar di antara desa-desa lain di Kabupaten Wonosobo meliputi beberapa desa di bawah ini:

**Tabel 1. Anggaran Keuangan Desa per Kecamatan Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Desa	Total Anggaran (Rp)
1	Banyumudal	Sapuran	2.774.253.700
2	Tempuran Duwur	Sapuran	2.393.303.728
3	Reco	Kertek	2.264.169.518
4	Gumawang Kidul	Watumalang	2.182.016.000
5	Tieng	Kejajar	2.154.861.325
6	Candiyasan	Kertek	2.029.527.186
7	Kwadungan	Kalikajar	1.997.686.000
8	Gadingrejo	Kepil	1.953.321.124
9	Banyumudal	Sapuran	2.021.621.000
10	Reco	Kertek	1.943.710.500
11	Kadipaten	Selomerto	1.917.928.833
12	Butuh Lor	Kalikajar	1.899.615.690
13	Mojosari	Mojotengah	1.914.181.375

No.	Kecamatan	Desa	Total Anggaran (Rp)
14	Bejiarum	Kertek	1.869.097.999
15	Sedayu	Sapuran	1.834.393.200
16	Bojasari	Kertek	1.786.844.359
17	Rimpak	Sapuran	1.880.158.187
18	Tempursari	Sapuran	1.805.782.400
19	Surengede	Kejajar	1.826.319.422
20	Serang	Kejajar	1.813.314.639
21	Bomerto	Wonosobo	1.769.310.467
22	Campursari	Kejajar	2.106.300.693
23	Gondowulan	Kepil	1.720.024.162
24	Pecekelan	Sapuran	1.748.042.112
25	Gadingrejo	Kepil	1.700.236.024
Jumlah			49.306.019.643

Sumber: Open Data Desa Kabupaten Wonosobo, 2018

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, berbagai permasalahan timbul seperti penyimpangan anggaran, pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan dan masih banyak permasalahan lain yang berkaitan dengan penerapan *good governance*. Sejak tahun 2015 hingga 2017, setidaknya ada beberapa kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum, seperti disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Kasus Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Lokasi	Kasus	Tindak lanjut
Desa Sikunang	Mantan kepala desa sebagai tersangka dalam penyelewengan dana desa tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 298 juta	Proses Pidana
Desa Karangrejo	Penggelapan dana desa sebesar Rp. 67 juta pada tahun anggaran 2016	Proses Pidana
Desa Rimpak	Penyelewengan dana PBB, total kerugian negara mencapai Rp 72 juta	Proses Pidana
Kabupaten Wonosobo	Penolakan MOU antara menteri PDT, Kemendagri dan Polri karena dianggap oleh PKKW tidak memberikan kesempatan kepada desa untuk mengelola secara mandiri dana desa	Mediasi
Kabupaten Wonosobo	Penyimpangan dana transfer	Arahan Bupati untuk program pengawalan tata kelola dana transfer desa di masing-masing wilayah

Sumber: Berbagai sumber diolah, 2018

Dana publik yang dikelola pemerintah desa juga harus dipertanggungjawabkan ke publik, artinya masyarakat juga harus tahu dana tersebut telah digunakan untuk apa saja dan proses yang ada didalamnya. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa, baik kepada masyarakat desa selaku subyek pembangunan dan juga kepada pemerintah daerah dan pusat. Namun demikian, keterbukaan data pengelolaan dana desa, perlu diimbangi dengan optimalisasi layanan dan tanggung jawab sesuai Undang-Undang Desa. Karena itulah aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang penting ketika masyarakat dicoba untuk diajak merumuskan pengelolaan dana desa sejak dini (Masruhin dan Kaukab, 2019). Artinya *open data* keuangan desa menjadi hal yang *urgens* untuk memberikan stimuli bagi masyarakat untuk aktif bersama mengelola dana desa.

## 2. LITERATUR REVIEW

### *Paradigma Administrasi Publik*

Sebagai organisasi publik maka pemerintah berkepentingan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan yang baik (*good government*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Junaedi, 2002). Kaitannya dengan peran pemerintah sebagai pelayan publik, Denhardt dan Denhardt (2003) menjelaskan bahwa dalam perjalanan administrasi publik sebagai disiplin ilmu dan seni (pengalaman pelaksanaan lapangannya) sedang bergelut dengan tiga pendekatan besar (*mainstream*), yaitu *old public administration*, *the new public management*, dan *new public service*.

*Good governance* yang merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan tentang pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat. *Good governance* ini mengisyaratkan adanya pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Paradigma *good governance* menekankan arti penting kesetaraan antara institusi Negara, swasta, dan masyarakat. Memperhatikan penjelasan tersebut tampak bahwa ada perubahan paradigma semakin menjadikan abdi masyarakat ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini terlihat dari adanya kombinasi kerjasama antara pihak pemerintah dan swastadalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sama-sama bekerja untuk tujuan yang sama yaitu kesejahteraan masyarakat.

### *Tata Kelola Keuangan Desa dan Good Governance*

Dana desa merupakan salah satu upaya untuk mempercepat laju pembangunan desa, sehingga proses pengelolaannya murni dikelola oleh desa sesuai kebutuhan masyarakat. Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002). *Pertama*, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. *Kedua*, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. *Ketiga*, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *ouput* yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Konsep *good governance* dari segi fungsional aspek *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi (Sedarmayanti, 2012). Lalolo Krina (2003) menjelaskan bahwa paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3) partisipasi masyarakat. Memperhatikan penjelasan di atas maka tata kelola pemerintahan desa tetap merunut pada aturan yang berlaku, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kerja serta laporan fisik kegiatan. Kenyataan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah desa terkait semua proses yang telah dikerjakan dalam satu periode.

### *Transparansi*

Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo, 2002). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri menyebutkan transparansi

adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).

Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis yaitu (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*); (2) kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu (Motik, 2003). Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, dimana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti. Memperhatikan penjelasan tersebut terlihat bahwa transparansi merupakan sesuatu yang penting untuk melahirkan kepercayaan publik. Transparansi dapat dilakukan pada semua unsur atau lembaga termasuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Karena itulah transparansi dalam penelitian ini merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini sangat penting, mengingat pemerintah desa mengelola dana publik yang digunakan untuk kepentingan publik pula.

#### *Akuntabilitas*

Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2002). Definisi lainnya menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjabar dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011). Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan dipemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya.

Memperhatikan penjelasan di atas terlihat bahwa akuntabilitas bagian yang penting dalam tata kelola keuangan ataupun kinerja organisasi publik termasuk didesa. Karena itulah akuntabilitas dalam penelitian ini merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya dalam satu periode kepada masyarakat desa. Akuntabilitas ini sangat penting, mengingat pemerintah desa mengelola dana publik yang cukup besar sehingga masyarakat desa juga perlu mengetahui pengelolaannya dalam bentuk pertanggungjawaban tiap tahunnya.

### **3. METODE**

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua desa di Kabupaten Wonosobo yang mengelola dana desa tahun 2019 yang tersebar dalam 236 desa, Metode pemilihan sampel dilakukan dengan teknik multi *stage cluster systematic sampling* (sampling kluster sistematis banyak tahap). Sampling kluster itu sendiri secara teknis populasi dibagi ke dalam sub-sub unit yang berukuran lebih kecil. Dengan menggunakan persentase kelonggaran (10 persen) maka dari populasi sebanyak 19.160 masyarakat di desa yang telah berumur 17 tahun diperoleh ukuran sampel sebanyak 100. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa data penelitian yaitu analisis data yang terkumpul dalam suatu penelitian harus melalui proses pengolahan data agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dilaksanakan (Ardial, 2014). Penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif sederhana yang berupaya menggambarkan gejala atau fenomena dari suatu variabel (Bungin, 2005) dalam kasus penelitian ini adalah tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### 4. HASIL

Hasil analisis deskriptif diketahui sebagian besar masyarakat desa yang menjadi responden penelitian berjenis kelamin laki-laki yaitu 59 persen, sedangkan 41 persen responden lainnya adalah perempuan. Usia responden antara 30-50 tahun yaitu 48 persen. Untuk usia 50 tahun ke atas dan kurang dari 30 tahun masing-masing berjumlah 16 persen dan 36 persen. Sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan SMA yaitu 39 persen, selanjutnya adalah SD sejumlah 32 persen, untuk pendidikan yang paling sedikit yaitu Diploma dan Sarjana, masing-masing 2 persen dan 7 persen. Untuk karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sebagian besar responden memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan petani yaitu 29 persen dan 27 persen.

Hasil uji validitas instrumen keseluruhan koefisien korelasi product moment memiliki nilai *sig.* (2-tailed) yang lebih kecil dibandingkan nilai  $\alpha$  (alpha) yang sebesar 0,05. Dengan demikian, ke-14 item pertanyaan variabel transparansi dapat dinyatakan valid. Hasil uji validitas instrumen dengan menggunakan teknik analisis butir menghasilkan keseluruhan koefisien korelasi product moment memiliki nilai *sig.* (2-tailed) yang lebih kecil dibandingkan nilai  $\alpha$  (alpha) yang sebesar 0,05. Dengan demikian, ke-16 item pertanyaan variabel akuntabilitas dapat dinyatakan valid. Pengujian reliabilitas kedua variabel yang digunakan yaitu transparansi dan akuntabilitas ternyata semuanya reliabel. Hal ini terbukti dari koefisien *alpha cronbach* yang dihasilkan semuanya lebih besar dari *r* tabel pada  $n = 98$ ;  $\alpha = 0,05$  yang sebesar 0,198.

Hasil penelitian diawali dengan mendeskripsikan setiap variabel sebagai upaya untuk mengetahui sifat data variabel. Ini merupakan hal pertama yang dilakukan dalam menganalisis data hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil kategorisasi masing-masing variabel dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini. Hasil pengkategorian transparansi pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3. Deskripsi Variabel Transparansi**

No	Item	Skor			Nilai	Indeks	Kategori
		3	2	1			
x.1	Informasi keuangan mulai dari perencanaan	23	63	14	209	69.7	Lengkap
x.2	Informasi keuangan tersaji lengkap diakhir tahun	23	61	16	207	69.0	Lengkap
x.3	Informasi keuangan sudah terbuka bisa diakses online	27	51	22	205	68.3	Mudah
x.4	Informasi keuangan sudah terbuka bisa diakses offline	23	65	12	211	70.3	Terbuka
x.5	Informasi keuangan tersaji di kantor desa	29	58	13	216	72.0	Lengkap
x.6	Mekanisme kontrol keuangan oleh BPD	20	62	18	202	67.3	Terkontrol
x.7	Mekanisme kontrol oleh masyarakat	28	47	25	203	67.7	Terkontrol
x.8	Kontrol keuangan bisa online dan di balai desa	19	59	22	197	65.7	Cukup Terkontrol
x.9	Dokumen keuangan tersedia di kantor desa	23	62	15	208	69.3	Lengkap
x.10	BPD memiliki dokumen keuangan desa lengkap	23	59	18	205	68.3	Lengkap
x.11	Masyarakat sudah dapat mengakses informasi keuangan	25	46	29	196	65.3	Cukup Mudah
x.12	Sistematika penyusunan informasi keuangan sudah standar	25	63	12	213	71.0	Standarisasi
x.13	Penyampaian informasi keuangan dengan bahasa yang	22	60	18	204	68.0	Mudah dipahami

No	Item	Skor			Nilai	Indeks	Kategori
		3	2	1			
	mudah dipahami						
x.14	LPJ akhir tahun senantiasa diserahkan ke BPD	23	58	19	204	68.0	Lengkap
	Jumlah nilai	333	814	253	2.880		
	Indeks				960	68,6	Baik

Sumber: data primer diolah, 2020

Hasil deskripsi variabel transparansi bila dikaitkan dengan kategori desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Tabulasi Silang Antara Kategori Desa dengan Tingkat Transparansi**

Transparansi \ Kategori desa	Kurang baik	Cukup Baik	Baik	Jumlah
Kecil	6 33,3%	15 25,9%	2 8,3%	23 23%
Menengah	8 44,4%	19 32,8%	3 12,5%	30 30%
Besar	4 22,2%	24 41,4%	19 79,2%	47 47%
Jumlah	18 100%	58 100%	24 100%	100 100%

Sumber: data primer diolah, 2020

Tabel tabulasi silang di atas menunjukkan desa dengan kategori menengah dan kecil cenderung kurang baik transparansinya dalam pengelolaan keuangan desa. Demikian halnya untuk pengelolaan keuangan desa dengan transparansi yang masuk kategori cukup baik. Sedangkan desa dengan kategori besar menunjukkan kecenderungan transparansi pengelolaan keuangan desanya masuk kategori baik.

Memperhatikan penyebaran item atau indikator pada variabel transparansi, terlihat bahwa penilaian tertinggi dialami oleh item kelima dengan indeks 72 persen. Item tersebut berkaitan dengan informasi keuangan yang tersaji dengan baik di kantor desa. Secara rinci indeks persepsi responden terkait variabel transparansi yang dibedakan tiap desa dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 5. Deskripsi Variabel Transparansi per Desa**

No	Item	Indeks								
		Desa dengan pendapatan tertinggi			Desa dengan pendapatan menengah			Desa dengan pendapatan terendah		
		Desa 1	Desa 2	Desa 3	Desa 4	Desa 5	Desa 6	Desa 7	Desa 8	Desa 9
x.1	Informasi keuangan mulai dari perencanaan	66.7	63.9	50.0	43.3	77.8	57.1	69.4	63.5	81.0
x.2	Informasi keuangan tersaji lengkap diakhir tahun	33.3	58.3	54.2	56.7	83.3	59.5	66.7	69.8	73.8
x.3	Informasi keuangan sudah terbuka bisa	55.6	69.4	75.0	66.7	88.9	64.3	63.9	55.6	61.9

No	Item	Indeks								
		Desa dengan pendapatan tertinggi			Desa dengan pendapatan menengah			Desa dengan pendapatan terendah		
		Desa 1	Desa 2	Desa 3	Desa 4	Desa 5	Desa 6	Desa 7	Desa 8	Desa 9
	diakses online									
x.4	Informasi keuangan sudah terbuka bisa diakses offline	33.3	47.2	58.3	53.3	83.3	66.7	61.1	68.3	73.8
x.5	Informasi keuangan tersaji di kantor desa	44.4	47.2	79.2	46.7	61.1	66.7	55.6	68.3	66.7
x.6	Mekanisme kontrol keuangan oleh BPD	33.3	69.4	83.3	70.0	83.3	64.3	47.2	68.3	64.3
x.7	Mekanisme kontrol oleh masyarakat	33.3	52.8	75.0	60.0	72.2	64.3	61.1	66.7	83.3
x.8	Kontrol keuangan bisa online dan di balai desa	33.3	66.7	79.2	53.3	77.8	64.3	63.9	71.4	76.2
x.9	Dokumen keuangan tersedia di kantor desa	44.4	66.7	70.8	73.3	83.3	57.1	52.8	63.5	64.3
x.10	BPD memiliki dokumen keuangan desa lengkap	44.4	58.3	58.3	53.3	72.2	54.8	72.2	73.0	76.2
x.11	Masyarakat sudah dapat mengakses informasi keuangan	55.6	58.3	75.0	56.7	88.9	59.5	63.9	66.7	88.1
x.12	Sistematika penyusunan informasi keuangan sudah standar	44.4	58.3	54.2	60.0	72.2	57.1	58.3	63.5	78.6
x.13	Penyampaian informasi keuangan dengan bahasa yang mudah dipahami	55.6	55.6	75.0	73.3	94.4	59.5	55.6	66.7	64.3
x.14	LPJ akhir tahun senantiasa diserahkan ke BPD	55.6	52.8	58.3	73.3	77.8	59.5	63.9	71.4	69.0
	Jumlah nilai	45.2	58.9	67.6	60.0	79.8	61.1	61.1	66.9	73.0

Sumber: data primer diolah, 2020

Hasil pengkategorian akuntabilitas dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6. Deskripsi Variabel Akuntabilitas**

No	Item	Skor			Nilai	Indeks	Kategori
		3	2	1			
y.1	SOP bagi pelaksana	25	59	16	209	69.7	Lengkap
y.2	Kesesuaian teknis dan prosedur	26	54	20	206	68.7	Sesuai
y.3	SOP pertanggungjawaban dijalankan konsisten	29	48	23	206	68.7	Konsisten
y.4	Selesaiannya kegiatan telah dilengkapi dengan dokumen	27	59	14	213	71.0	Lengkap
y.5	Pengawasan berkala	23	67	10	213	71.0	Berkala
y.6	Sanksi tiap kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan	20	62	18	202	67.3	Konsisten
y.7	Pembuatan LPJ secara berkala	30	54	16	214	71.3	Berkala
y.8	LPJ kegiatan dapat diakses masyarakat	25	56	19	206	68.7	Mudah diakses
y.9	LPJ telah dipublish untuk publik secara <i>online</i>	21	60	19	202	67.3	Mudah diakses
y.10	LPJ telah dipublish untuk publik secara <i>offline</i>	26	62	12	214	71.3	Mudah diakses
y.11	LPJ memuat dari kegiatan awal (perencanaan)	20	71	9	211	70.3	Lengkap
y.12	Saat ini LPJ mudah diakses masyarakat	21	58	21	200	66.7	Cukup mudah diakses
y.13	Meningkatnya kepercayaan akibat akuntabel	28	56	16	212	70.7	Meningkat kepercayaan
y.14	LPJ dengan dukungan IT membuat aktif masyarakat	20	60	20	200	66.7	Cukup Aktif
y.15	Publikasi informasi untuk kepentingan bersama	27	55	18	209	69.7	Kepentingan bersama
y.16	Akuntabilitas saat ini mengurangi kasus KKN	26	59	15	211	70.3	Berkurang KKN
Jumlah nilai		394	940	266	3.328		
Indeks					1.109	69,33	Baik

Sumber: data primer diolah, 2020

Hasil deskripsi variabel akuntabilitas bila dikaitkan dengan kategori desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Tabulasi Silang Antara Kategori Desa dengan Tingkat Akuntabilitas**

Akuntabilitas Kategori desa	Kurang baik	Cukup Baik	Baik	Jumlah
Kecil	8 61,5%	13 20,6%	2 8,3%	23 23%
Menengah	3 23,1%	24 38,1%	3 12,5%	30 30%
Besar	2 15,4%	26 41,3%	19 79,2%	47 47%
Jumlah	13 100%	63 100%	24 100%	100 100%

Sumber: data primer diolah, 2020

Tabel tabulasi silang di atas menunjukkan desa dengan kategori kecil cenderung kurang baik akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk desa dengan kategori menengah, menunjukkan kecenderungan pengelolaan keuangan desa dengan akuntabilitas yang masuk kategori cukup baik. Sedangkan desa dengan kategori besar menunjukkan kecenderungan akuntabilitas pengelolaan keuangan desanya masuk kategori baik. Secara rinci indeks persepsi responden terkait variabel akuntabilitas yang dibedakan tiap desa dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 8. Deskripsi Variabel Akuntabilitas per Desa**

No	Item	Indeks								
		Desa dengan pendapatan tertinggi			Desa dengan pendapatan menengah			Desa dengan pendapatan terendah		
		Desa 1	Desa 2	Desa 3	Desa 1	Desa 2	Desa 3	Desa 1	Desa 2	Desa 3
y.1	SOP bagi pelaksana	33.3	61.1	58.3	60.0	72.2	59.5	69.4	66.7	69.0
y.2	Kesesuaian teknis dan prosedur	55.6	52.8	79.2	70.0	77.8	47.6	63.9	65.1	76.2
y.3	SOP pertanggungjawaban dijalankan konsisten	55.6	63.9	83.3	63.3	94.4	50.0	61.1	65.1	61.9
y.4	Selesaiannya kegiatan telah dilengkapi dengan dokumen	55.6	58.3	45.8	66.7	61.1	64.3	77.8	61.9	59.5
y.5	Pengawasan berkala	55.6	55.6	62.5	60.0	77.8	61.9	58.3	65.1	64.3
y.6	Sanksi tiap kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan	66.7	50.0	58.3	66.7	72.2	64.3	77.8	69.8	66.7
y.7	Pembuatan LPJ secara berkala	33.3	50.0	58.3	43.3	72.2	59.5	61.1	79.4	66.7
y.8	LPJ kegiatan dapat diakses masyarakat	44.4	55.6	66.7	60.0	88.9	54.8	69.4	69.8	66.7
y.9	LPJ telah dipublish untuk publik secara <i>online</i>	55.6	66.7	70.8	60.0	77.8	54.8	66.7	68.3	71.4
y.10	LPJ telah dipublish	44.4	58.3	50.0	60.0	72.2	59.5	66.7	66.7	64.3

No	Item	Indeks								
		Desa dengan pendapatan tertinggi			Desa dengan pendapatan menengah			Desa dengan pendapatan terendah		
		Desa 1	Desa 2	Desa 3	Desa 1	Desa 2	Desa 3	Desa 1	Desa 2	Desa 3
	untuk publik secara <i>offline</i>									
y.11	LPJ memuat dari kegiatan awal (perencanaan)	44.4	52.8	58.3	56.7	66.7	64.3	72.2	68.3	64.3
y.12	Saat ini LPJ mudah diakses masyarakat	44.4	55.6	70.8	56.7	88.9	54.8	66.7	71.4	81.0
y.13	Meningkatnya kepercayaan akibat akuntabel	44.4	58.3	58.3	70.0	83.3	45.2	61.1	74.6	59.5
y.14	LPJ dengan dukungan IT membuat aktif masyarakat	44.4	52.8	70.8	40.0	83.3	66.7	77.8	76.2	69.0
y.15	Publikasi informasi untuk kepentingan bersama	55.6	44.4	66.7	70.0	77.8	59.5	69.4	68.3	61.9
y.16	Akuntabilitas saat ini mengurangi kasus KKN	33.3	52.8	66.7	50.0	61.1	61.9	61.1	74.6	71.4
	Jumlah	47.9	55.6	64.1	59.6	76.7	58.0	67.5	69.4	67.1

Sumber: data primer diolah, 2020

Keterangan:

- Desa 1 : Desa Ngalian
- Desa 2 : Desa Krasak
- Desa 3 : Desa Pancurwening
- Desa 4 : Desa Jogoyitnan
- Desa 5 : Desa Candirejo
- Desa 6 : Desa Bener
- Desa 7 : Desa Tlogojati
- Desa 8 : Desa Ropoh
- Desa 9 : Desa Slukatan

## 5. PEMBAHASAN

Kucuran dana bagi percepatan pembangunan desa terus dilakukan pemerintah, guna mengoptimalkan kemampuan desa untuk terus berdikari dengan memberdayakan potensi yang dimilikinya, baik potensi alam, potensi SDM dan lainnya. Dukungan masyarakat tentu saja menjadi bagian penting untuk semua proses tersebut. Pada tataran inilah pemerintah desa harus mampu memberikan layanan yang terbaik termasuk berupaya mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

### *Variabel Transparansi*

Hasil penelitian terkait transparansi pengelolaan keuangan desa pada Tabel 3 menyimpulkan bahwa transparansi yang ada saat ini sudah tergolong baik, hal ini dipersepsikan sebagian besar responden dengan indeks 68,57 atau dalam kategori baik. Penilaian ini mengindikasikan bahwa transparansi keuangan desa di Kabupaten Wonosobo sudah mampu memenuhi keinginan mereka untuk mengetahui data keuangan desa, terutama data pembangunan yang ada di desanya masing-masing. Proses ini diperkuat juga dengan sistem

informasi yang dilakukan secara online, walaupun masih gabung dalam open data desa dalam situs <https://datadesa.wonosobokab.go.id/about>.

Data keuangan desa seperti tampil dalam web open data desa Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu terobosan untuk memberikan informasi secara akurat bagi masyarakat luas terkait dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Proses transparansi sudah diupayakan untuk dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh desa di Kabupaten Wonosobo.

Memperhatikan penyebaran item atau indikator pada variabel transparansi, terlihat bahwa penilaian tertinggi dialami oleh item kelima dengan indeks 72 persen. Item tersebut berkaitan dengan informasi keuangan yang tersaji dengan baik di kantor desa. Kenyataan ini didukung dengan hasil observasi di lapangan terutama di Desa Pancurwening, dimana informasi keuangan desa tersaji di pintu masuk bagian dalam kantor desa.

Informasi keuangan tersebut mencakup data penerimaan desa tahun 2019 dan juga penggunaannya. Melalui informasi ini setidaknya menjadikan masyarakat tahu dan memahami bahwa dana yang diterima oleh desa sudah dimanfaatkan peruntukannya guna pembangunan desa, baik bersifat fisik maupun non fisik. Kenyataan ini juga dapat menjadi alat kontrol bagi masyarakat bahwasanya kegiatan secara riil apakah sudah sesuai dengan alokasi anggaran yang dilaporkan dalam publikasi tersebut.

Item untuk indeks terendah variabel transparansi terjadi pada item kesebelas dengan indeks 65,3 persen. Item ini terkait dengan masyarakat sudah dapat mengakses informasi keuangan desa, dan responden memberi penilaian cukup mudah. Adanya perubahan sistem penyampaian informasi publik terkait keuangan desa secara *online* dan *offline*, ada sebagian masyarakat yang belum mengakses informasi tersebut. Masyarakat lebih banyak tahu informasi keuangan desa hanya melalui media publikasi yang ada di desa saja, yaitu baik di kantor desa, tempat strategis lainnya yang biasanya dijadikan tempat publikasi oleh pemerintah desa.

Berdasarkan kajian di atas diketahui bahwa transparansi keuangan desa di Kabupaten Wonosobo yang ada saat ini sudah tergolong baik dengan indeks 68,57. Artinya transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo sudah mampu memenuhi keinginan masyarakat terkait data keuangan desa, terutama data pembangunan yang ada di desanya masing-masing. Kondisi ini juga didukung oleh akses informasi tersebut terbuka bagi siapa saja, terutama masyarakat desa. Informasi keuangan desa ini juga dapat dilihat atau diakses pada open data desa Kabupaten Wonosobo pada web [datadesa.wonosobokab.go.id](https://datadesa.wonosobokab.go.id). Informasi keuangan secara *online* terkait dana desa juga menampilkan rincian penerimaan dana pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah desa dari berbagai sumber. Sementara itu untuk mekanisme kontrol secara kelembagaan ditingkat masyarakat desa diwakili oleh lembaga BPD, yang menjadi bagian penyeimbang setiap langkah nyata kebijakan pemerintah desa. Proses pengelolaan keuangan desa sejak awal sudah didampingi atau dikawal oleh unsur BPD maupun tokoh masyarakat terutama dalam forum resmi yang diadakan di desa.

#### *Variabel Akuntabilitas*

Hasil secara statistik kondisi perspsi akuntabilitas dari sisi masyarakat desa terlihat pada tabel 6. Memperhatikan tabel tersebut maka akuntabilitas keuangan desa sudah baik, hal ini dipersepsikan oleh sebagian besar responden, dengan nilai indeks yang tinggi (69,33). Keuangan yang dikelola desa sebenarnya juga hak bagi masyarakat untuk tahu dana tersebut dipakai untuk apa saja, karena sesungguhnya masyarakat merupakan subyek dari pembangunan didesanya sendiri. Tidak hanya itu, aspek pertanggungjawaban melalui pengelolaan dana publik yang akuntabel merupakan harapan berbagai pihak. Akuntabilitas keuangan desa yang baik, akan semakin meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, terlebih pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa secara langsung maupun tidak akan senantiasa membutuhkan keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat.

Memperhatikan data pada tabel 6. tampak bahwa distribusi indeks untuk item variabel akuntabilitas dengan nilai tertinggi (71,3 persen) terjadi pada dua item yaitu item ketujuh dan kesepuluh. Item ketujuh berkaitan dengan pembuatan LPJ keuangan yang dilakukan secara berkala, hal ini terkait pula dengan sistem pelaporan pembangunan fisik yang dilaporkan sesuai perkembangan pembangunan secara riil. Untuk item kesebelas sehubungan dengan pembuatan LPJ yang dilaporkan mulai dari penyusunan perencanaan sampai akhir pelaksanaan, yang disertai pula laporan dalam bentuk photo kegiatan. Hal ini mengandung arti bahwa

LPJ disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan, adapun laporan perkembangan fisik pembangunan biasanya dilakukan menyesuaikan bentuk laporan tersendiri, terutama terkait persentase capaian fisik sesuai termin tertentu.

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan desa di Kabupaten Wonosobo sudah baik, dengan indeks 69,33. Akuntabilitas yang dinilai sudah baik setidaknya mengindikasikan perbaikan sistem pertanggungjawaban kepada publik terkait dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Kondisi yang demikian didukung dengan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan SOP. Kegiatan yang menggunakan dana desa tentu saja terealisasi baik secara fisik dan dilaporkan secara administrasi dalam bentuk laporan kegiatan. Proses tersebut juga diikuti dengan pengawasan, dalam hal ini keuangan desa secara langsung dimonitoring oleh pemerintah kabupaten dan pihak kecamatan dan juga masyarakat desa. Pembuatan LPJ yang dilakukan secara berkala merupakan bagian upaya mewujudkan akuntabilitas yang komprehensif bertujuan untuk proses pemantauan kegiatan lebih efektif dan efisien. Ketika ada masalah dalam kegiatan tahap pertama, maka perlu diselesaikan secara segera, sebelum turunnya anggaran tahap berikutnya. Akuntabilitas yang dijalankan ini setidaknya sudah mampu menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

## 6. SIMPULAN

Otonomi desa memberikan peluang bagi desa untuk mengelola keuangannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara transparan. Hasil penelitian membuktikan bahwa transparansi keuangan desa di Kabupaten Wonosobo yang ada saat ini sudah tergolong baik dengan indeks 68,57. Memperhatikan penilaian yang baik dari masyarakat tentu saja menjadi cerminan sistem transparansi keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. Transparansi keuangan desa yang sudah baik dapat dilihat dari akses informasi tersebut terbuka bagi siapa saja, terutama masyarakat desa. Informasi keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat secara *offline* melalui media publikasi yang ada di sekitaran desa dan dapat diakses pada *open* data desa Kabupaten Wonosobo pada web [datadesa.wonosobokab.go.id](http://datadesa.wonosobokab.go.id). Informasi keuangan secara *online* terkait dana desa juga menampilkan rincian penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah desa dari berbagai sumber. Sistem kontrol dari pihak terkait, terutama masyarakat desa, lembaga desa, dan juga instansi kecamatan/kabupaten menjadikan pemerintah desa berusaha untuk terus transparan dalam mengelola anggaran tiap tahunnya. Transparansi anggaran didukung pula dengan publikasi keuangan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat desa melalui media komunikasi yang mudah diakses oleh mayoritas masyarakat desa.

Keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa saat ini jumlahnya cukup banyak, dan disisi lain membutuhkan pertanggungjawaban dari pengelolanya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan desa di Kabupaten Wonosobo sudah baik, dengan indeks 69,33. Persepsi masyarakat yang baik terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tentu saja menjadi cerminan kinerja mereka selama ini. Kenyataan ini didukung dengan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan SOP. Kegiatan yang menggunakan dana desa tentu saja terealisasi baik secara fisik dan dilaporkan secara administrasi dalam bentuk laporan kegiatan. Akuntabilitas keuangan desa diperkuat melalui pengawasan yang dilakukan langsung terutama oleh masyarakat dan lembaga desa, selain juga dimonitoring oleh pemerintah kabupaten dan pihak kecamatan. Pembuatan LPJ yang dilakukan secara berkala merupakan bagian upaya mewujudkan akuntabilitas yang komprehensif bertujuan untuk proses pemantauan kegiatan lebih efektif dan efisien. Ketika ada masalah dalam kegiatan tahap pertama, maka perlu diselesaikan secara segera, sebelum turunnya anggaran tahap berikutnya. Proses yang demikian semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja aparat pemdes dalam mengelola keuangan desa dimana dari sisi praktisnya telah mampu meminimalisir penyalahgunaan anggaran.

Transparansi keuangan pemerintah desa merupakan bagian dari kepatuhan desa terkait tata kelola keuangan desa yang harus dikelola sebagai dana publik, sehingga sudah semestinya proses pengelolaannya juga harus transparan dan akuntabel. Karakteristik pengelola keuangan desa dalam hal ini pemerintah desa yang tidak sama, menjadikan sebagian diantara desa masih terkendala SDM yang belum mampu IT, sehingga kedepannya perlu menjadi perhatian pihak pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kompetensi pengelola keuangan di tingkat desa.

Upaya peningkatan proses akuntabilitas keuangan desa, maka pemerintah daerah perlu melakukan penguatan pada proses kontrol secara berkala ke desa. Komitmen pengelola keuangan desa yang terkadang masih labil dalam membuat laporan yang tepat waktu, dan juga tidak langsung dipublikasi, baik di kantor desa maupun *online*. Kondisi yang demikian, lambat laun akan memberikan dampak langsung bagi kepercayaan publik, yang kontradiksi dengan tujuan dalam hal *open* data keuangan yang telah diberlakukan di Kabupaten Wonosobo.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Alfasadun, Pancawati Hardiningsih, dan Sri Devi Ratnasari<sup>3</sup>, Ceacilia Srimindarti, 2018, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Proceeding SENDI\_U*. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers, Unisbank, Semarang, hal: 684-691.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administarasi Negara Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Putaka Setia, Bandung.
- Ardial. 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi IV). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014". *Jurnal Berkala: Akuntansi dan Keuangan Indonesesia*. Vol. 1 No. 1. 2016. Universitas Setia Budi, Surakarta. Hal. 1-14.
- Atmadja A T, Saputra K A K. 2018. "Determinant Factors Influencing the Accountability of Village Financial Management". *Academy of Strategic Management Journal*. Vol. 17 No. 1 (Print ISSN: 1544-1458; Online ISSN: 1939-6104), Allied Business Academies. London.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
- Brikenda Vokshi, 2016, *Transparency In Management of Public Funds, International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom* Vol. IV, Issue 1, January, hal: 553- 559.
- Bungin, B. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana
- Chairun Nasirin, 2013, *Reformasi Administrasi Publik: Sebuah Kajian Konseptual, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.4, No.2, Juli-Desember, hal: 92-99.
- Denhardt, Janer V, and Robert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service : Serving Not Steering*. Armonk, N.Y : M.E.Sharpe.
- Dwiyanto Agus . 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Enkeleda Lulaj, 2019, *Transparency And Accountability In The Public Budget, Empirical Study (Data Analysis) In Local Governments- Municipalities, International Journal of Education and Research* Vol. 7 No. 4 April, hal: 69-86.
- Fajar Trilaksana Moedarlis. 2016. "Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)". *Naskah Publikasi*. 18 Desember 2016. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Febby Rosielita, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Ni Kadek Sinarwati. 2017. "Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng)". *e-Journal SI Ak*. Vol: 8 No: 2 Tahun 2017. Universitas Pendidikan Ganesha, Denpasar.
- Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, Stanly W. Alexander. 2018. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), hal: 76-84
- Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani, 2019, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut), *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM* Volume. 2, No.1, Juni, hal: 52-66.

- Gayatri, Made Yeni Latrini dan Ni Luh Sari Widhiyani, 2017, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 10 No. 2, hal: 175-182.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Embat. Jakarta.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI Press
- Hariyoso, S. 2002. *Pembaharuan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Peradaban
- I Made Yoga Darma Putral N, Ketut Rasmini, 2019, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, *E-Jurnal Akuntansi* Vol.28.1.Juli hal: 132-158.
- Junaedi. 2002. Balanced Scorecard: Pengukuran Kinerja Pada Pemerintah Daerah. *KOMPAK*, No. 6, September.
- Kabiru Isa Dandago, 2018, Transparency and Accountability in Public Financial Management: A Stewardship Account at Kano State Ministry of Finance, Nigeria, *International Journal of Financial Research* Vol. 9, No. 2, hal: 765-89.
- Kaukab, M. E. (2020). Indonesian Economic Outlook 2020: Peluang Dari Keterbukaan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 7(1), 38-47.
- Kemas Arsyad Somad, 2012, Reformasi Birokrasi Desa Menuju Pemerintahan Desa Yang Demokratis, *MMH*, Jilid 41 No. 4 Oktober 2012: 487-492.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2006. "Pelayanan yang Akuntabel dan Bebas dari KKN", dalam Agus Dwiyanto, ed .2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta, : PT. Erlangga
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas Dan Good Governance Lembaga Admnistrasi Negara dan Badan Penagwas Keuangan dan Pembangunan*. Jakarta
- Krina Liona. Lalolo 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas, Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Ofset, Yogyakarta.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 118-130.
- Miriam Budiarto. 1998. *Menggapai Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Mizan.
- Mohamad Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Motik, Suryani Sidik. 2003. "Transparansi & Akuntabilitas dan Minat Berinvestasi". *Jurnal Forum Inovasi Capacity Building & Good Governance*. Vol. 8: September-Nopember.
- Priyono, M. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo : Zifatma Publishing
- Putri Wahyuningsih dan Kiswanto. 2016. "Factors Affecting The Accountability of Village Financial Management". *Accounting Analysis Journal*. Vol 5 No. 3 Agustus 2016. DOI <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i3.19419>. Universitas Negeri Semarang
- Riswanda Imawan. 2005. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good governance dalam Syamsudin Haris (Editor), Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Rochmat Aldy Purnomo, 2017, *Menulis Penelitian*, Unmuh Ponorogo Press, Ponorogo.
- Sadu Wasistiono. 2005. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance dalam Syamsudin Haris (Editor), Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Said, M. Mas'ud, 2007, *Birokrasi di Negara Birokratis*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Sagita, Reflay Ade dan Widayati. 2017. "Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo". *Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2 Juni 2017. Unissula, Semarang hal. 293 – 306
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.

- Sarwono J., 2009. *Statistik Itu Mudah: Panduan Lengkap untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan III, Alfabeta, Bandung.
- Sedarmayanti. 2004. *Good governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance Kepemerintahan Yang baik* Bagian Kedua edisi revisi, Mandar Maju, Bandung.
- Singarimbun, Masri, Effendi S. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarno. 2017. *Data Analysis*. Departemen Statistika Fakultas Sains dan Matematika UNDIP. Semarang.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2010, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Manajemen Penelitian*. Jjakarta: Rineka Cipta.
- Sumpeno, Wahyudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh.
- Tatiek Sri Djatmiati, Eman, Heru Irianto, dan Urip Santoso, 2014, Transparency and Accountability in the Finance Management of the Local Government in Promoting Good Governance, *Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 19, Issue 9, Ver. IX Sep., hal: 15-19.
- Thoha, Miftah, 2008. *Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik*. Penerbit Rangkang Education, Yogyakarta.
- Tuti Amalya, Akram, Endar Pituringsih. "Determinants of Village Financial Management and Its Implication toward Accountability: Study on Village Governance in West Lombok Regency". *International Journal of Research in Advent Technology*, Vol.5, No.12, December 2017 E-ISSN: 2321-9637 Available online at [www.ijrat.org](http://www.ijrat.org). Magister of Accounting Faculty of Economics and Business Universitas Mataram, Indonesia.
- Umar, Husein, 2010, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Warsito Utomo. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia, (Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Winardi, Abdi, 2004. *Teori Perilaku Birokrasi*. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.